

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam satu dekade terakhir, perdebatan mengenai kemiskinan semakin intensif di berbagai forum dunia meski masalah ini bukanlah hal baru. Realitanya, pembangunan ekonomi belum berhasil mengatasi lonjakan jumlah penduduk miskin di negara berkembang, termasuk Indonesia (Suryawati, 2015). Zuhdiyaty (2017), menambahkan bahwa meskipun ada kemajuan dalam pendapatan nasional dan sektor produksi, kemiskinan tetap menjadi tantangan struktural yang sulit dipecahkan di negara-negara tersebut.

Masalah kemiskinan bersifat multidimensional yang disebabkan oleh banyak faktor yang tidak hanya dibidang ekonomi saja, tetapi juga politik, sosial, budaya dan sistem sosial lainnya. Meskipun ekonomi tumbuh, masalah seperti rendahnya upah kerja, akses pendidikan yang terbatas, pengangguran dapat memperparah kondisi kemiskinan. Masalah kemiskinan di Indonesia merupakan fenomena yang sangat kompleks, tidak cukup hanya melihatnya dari sisi ekonomi seperti pendapatan atau konsumsi, karena kemiskinan juga dipengaruhi oleh faktor sosial, politik, budaya, dan sistem struktural yang saling terkait. Dalam konteks ini, pendekatan multidimensional menjadi sangat relevan karena mampu menangkap berbagai aspek yang memengaruhi kesejahteraan masyarakat. Misalnya, akses terhadap pendidikan, layanan kesehatan, air bersih, dan perumahan layak merupakan indikator penting yang sering kali terabaikan dalam analisis ekonomi konvensional. Ketika inflasi meningkat, dampaknya tidak hanya dirasakan dalam bentuk penurunan daya beli, tetapi juga memperburuk ketimpangan sosial,

mempersempit akses terhadap kebutuhan dasar, dan memperkuat lingkaran setan kemiskinan.

Yasin (2015) menguraikan bahwa inflasi tinggi secara langsung memaksa warga miskin mengorbankan investasi jangka panjang seperti pendidikan dan kesehatan demi bertahan hidup, yang kemudian mengunci mereka dalam lingkaran kemiskinan. Realitas ini membuktikan bahwa kemiskinan bukan hanya soal angka ekonomi semata. Faktor-faktor seperti upah yang tidak layak, sulitnya akses pendidikan, dan pengangguran merupakan variabel krusial yang tetap dapat memperparah kemiskinan meskipun indikator pertumbuhan ekonomi menunjukkan tren positif.

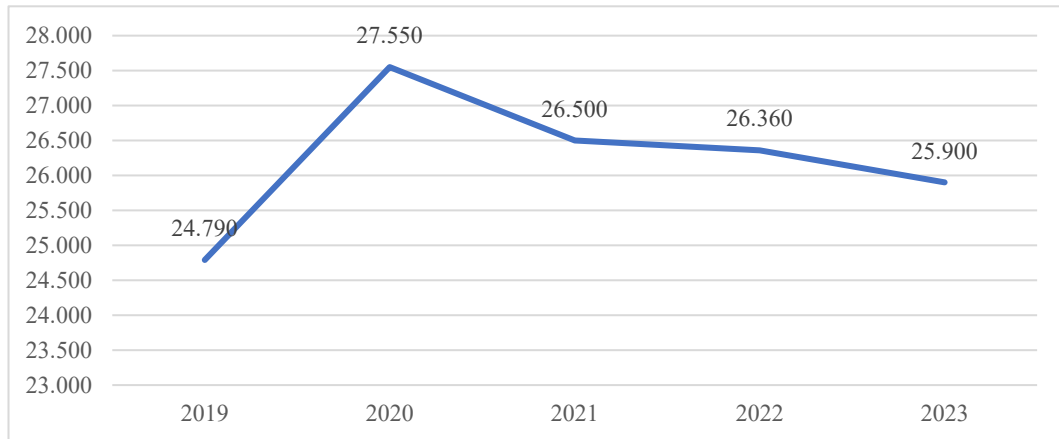
Perhatian dunia terhadap kemiskinan di Indonesia sering kali dipicu oleh perbedaan standar pengukuran, sebagaimana terlihat dalam data 2023. World Bank (2024), melaporkan bahwa 171,8 juta jiwa (60,3%) penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan internasional sebesar US\$6,85 PPP (*Purchasing Power Parity*) atau paritas daya beli. Namun, melalui pendekatan kebutuhan dasar, BPS melaporkan angka yang jauh lebih rendah, yakni 9,36% atau 25,90 juta jiwa. Kontradiksi data ini merupakan hasil dari penggunaan parameter yang berbeda: World Bank menggunakan tolak ukur ekonomi global, sementara BPS fokus pada standar pemenuhan kebutuhan dasar domestik.

Menurut laporan *World Bank* (2025), Indonesia menempati urutan kedua tertinggi dalam hal tingkat kemiskinan di wilayah Asia Tenggara. Berdasarkan standar pengukuran yang sama, posisi Indonesia berada di bawah Laos (68,9% dari 7,8 juta jiwa), namun masih di atas Filipina yang berada di angka 50,6% (dari 115,8 juta jiwa). Sebagai perbandingan lebih lanjut, negara-negara seperti

Vietnam, Thailand, dan Malaysia memiliki angka kemiskinan yang jauh lebih kecil, yakni masing-masing sebesar 18,2%, 7,1%, dan 1,3%.

Kompleksitas kemiskinan di Indonesia terlihat dari adanya tekanan ganda pada masyarakat upah yang tidak layak dan kenaikan harga barang esensial. Lemahnya kepatuhan terhadap standar UMR serta meluasnya sistem kerja kontrak membuat pendapatan pekerja terutama di sektor harian tidak mampu mengikuti laju inflasi bahan pangan. Ketimpangan ini memaksa kelompok miskin terjebak dalam sulitnya pemenuhan kebutuhan dasar, yang sering kali berujung pada pengurangan belanja pangan atau pemilihan asupan dengan kualitas gizi yang rendah.

Kemiskinan di Indonesia bukan hanya soal kurangnya uang, tetapi juga soal sistem yang membuat orang sulit keluar dari kemiskinan. Misalnya, akses terhadap modal usaha sangat sulit bagi masyarakat miskin karena persyaratan yang rumit dari bank dan lembaga keuangan. Selain itu, kesenjangan antara kaya dan miskin semakin lebar, dengan sebagian kecil masyarakat menikmati kekayaan yang sangat besar, sementara jutaan orang masih berjuang untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka (Ibrahim, 2025). Berikut data kemiskinan di Indonesia lima tahun terakhir mulai tahun 2019-2023 :



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2025

Gambar 1. 1 Kemiskinan Indonesia Tahun 2019 – 2023 (%)

Berdasarkan Gambar 1.1 menunjukkan bahwa kemiskinan di Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2019, angka kemiskinan di Indonesia mencapai titik terendah yaitu sebesar 24.790 juta jiwa, peningkatan infrastruktur investasi besar-besaran dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, dan fasilitas umum, membuka akses ke daerah terpencil dan meningkatkan aktivitas ekonomi di wilayah tersebut. Peningkatan kemiskinan di Indonesia terjadi pada tahun 2020 sebesar 27.550 juta jiwa, disebabkan oleh pandemi Covid-19. Pandemi ini berdampak besar pada ekonomi Indonesia, menyebabkan banyak orang kehilangan pekerjaan dan pendapatan, sehingga hal tersebut membuat sebagian masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan hidupnya dan membuat angka kemiskinan mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan pada tahun 2021 sampai 2023 mencapai 25.900 juta jiwa disebabkan oleh pemulihan ekonomi.

Aktivitas ekonomi yang meningkat membantu menciptakan lapangan kerja dan meningkatkan pendapatan masyarakat. Pemerintah juga meluncurkan berbagai program bantuan sosial untuk mendukung rumah tangga miskin dan rentan, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan sembako membantu

meringankan beban ekonomi masyarakat miskin, dengan meningkatnya aktivitas ekonomi, tingkat pengangguran juga mulai menurun, sehingga lebih banyak orang yang memiliki pekerjaan dan pendapatan tetap yang pada akhirnya berdampak pada penurunan angka kemiskinan (BPS, 2023).

Ada banyak berbagai faktor yang menyebabkan kemiskinan di Indonesia dan faktor yang dapat memperburuk keadaan perekonomian di Indonesia salah satunya adalah inflasi. Inflasi memiliki peran yang signifikan dalam memperburuk kondisi kemiskinan di Indonesia, terutama bagi kelompok masyarakat yang berpenghasilan rendah. Ketika inflasi terjadi, harga barang dan jasa naik, yang menyebabkan daya beli masyarakat menurun. Dampaknya paling dirasakan oleh masyarakat berpendapatan rendah karena sebagian besar pendapatan mereka sudah teralokasi untuk memenuhi kebutuhan dasar.

Dari penelitian Sukanto & Widaryanti, (2015) inflasi adalah suatu keadaan dimana tingkat harga secara umum (*price level*) cenderung meningkat. Penyebab inflasi itu adalah kenaikan permintaan melebihi penawaran atau di atas kemampuan berproduksi yang menyebabkan harga menjadi naik (*demand pull inflation*) dan mempengaruhi daya beli masyarakat miskin sehingga berpengaruh kepada tingkat kemiskinan, inflasi juga dapat terjadi atau datang dari sisi penawaran, yakni kenaikan biaya produksi sehingga harga naik (*cost push inflation*).

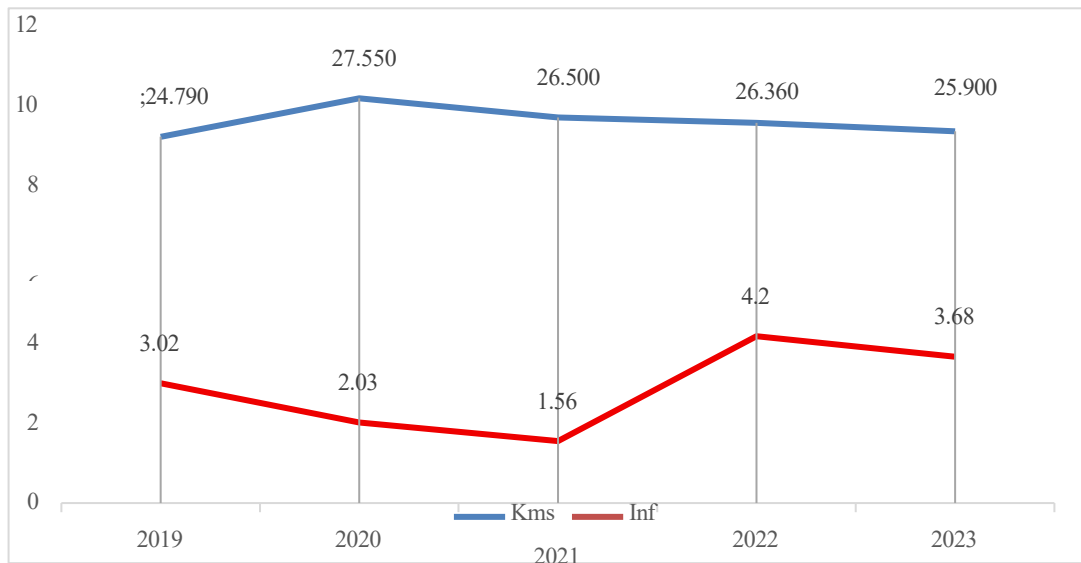
Saat ini, inflasi di Indonesia berada dalam kisaran yang relatif terkendali. Berdasarkan berita terbaru, inflasi pada tahun 2024 sebesar 23.360 juta jiwa dan tahun 2025 tercatat sebesar 24.060 juta. Kenaikan ini terutama dipengaruhi oleh

peningkatan pengeluaran selama perayaan idul fitri, yang menyebabkan lonjakan harga pada beberapa sektor, seperti makanan, pakaian dan perlengkapan rumah.

Beberapa alasan mengapa inflasi yang stabil dibutuhkan untuk memastikan kesejahteraan ekonomi masyarakat, ketika inflasi terjadi secara moderat, harga barang dan jasa naik secara bertahap. Ini mendorong masyarakat untuk segera berbelanja sebelum harga semakin meningkat, sehingga memperkuat permintaan di pasar. Peningkatan konsumsi akan menggerakkan ekonomi, menciptakan lapangan kerja baru, dan mendorong sektor bisnis untuk berkembang. Inflasi yang terkontrol memungkinkan perusahaan menyesuaikan upah pekerja dengan kenaikan harga barang dan jasa. Upah yang meningkat seiring inflasi akan menjaga daya beli masyarakat, sehingga mereka tetap mampu memenuhi kebutuhan dasar tanpa harus mengalami tekanan ekonomi yang berat.

Inflasi yang terlalu tinggi memang berbahaya, karena dapat mengurangi daya beli masyarakat dan membuat harga kebutuhan pokok melambung. Namun, inflasi yang terlalu rendah atau deflasi juga bisa merugikan ekonomi, memperlambat pertumbuhan industri, dan meningkatkan angka kemiskinan. Oleh karena itu, pemerintah harus menjaga inflasi agar ekonomi tetap stabil dan kemiskinan dapat ditekan (Ekon, 2025).

Berikut data kemiskinan dan inflasi di Indonesia berdasarkan dari 5 tahun terakhir mulai tahun 2019-2023:



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2025

Gambar 1. 2 Kemiskinan dan Inflasi Indonesia Tahun 2019 – 2023 (%)

Gambar 1.2 diatas menunjukkan perubahan data dua variabel, yaitu kemiskinan (Kms) dan inflasi (Inf) dari tahun 2019 hingga 2023. Garis biru mewakili tingkat kemiskinan (Kms). Garis merah mewakili tingkat inflasi (Inf), yang mengalami penurunan dari 3,02% pada 2019 menjadi 1,56% pada 2021. Penurunan inflasi pada 2019-2021 terjadi karena lemahnya daya beli masyarakat akibat pandemi, sehingga harga barang dan jasa tidak mengalami kenaikan signifikan, lalu meningkat tajam ke 4,2% pada 2022. Lonjakan inflasi pada 2022 dipicu oleh kenaikan harga bahan pangan dan energi, serta pemulihan ekonomi yang meningkatkan permintaan, sebelum akhirnya turun kembali ke 3,68% pada 2023. Penurunan inflasi pada 2023 terjadi karena kebijakan pemerintah dalam menjaga stabilitas harga dan meningkatkan ketahanan pangan.

Gambar 1.2 ini menunjukkan bagaimana fenomena kemiskinan dan inflasi saling berkaitan, di mana pada tahun 2020 terjadi deflasi namun kemiskinan meningkat. Penyebab nya adalah penurunan harga komoditas yang dikonsumsi

penduduk miskin harga beras, daging ayam, gula pasir, dan telur ayam mengalami penurunan. Meskipun ini mengurangi tekanan inflasi, tetap saja pendapatan masyarakat miskin tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan dasar. Pada tahun 2022 inflasi meningkat namun kemiskinan menurun. Penyebabnya adalah subsidi yang diberikan pemerintah, pemerintah meningkatkan subsidi energi yang membantu menahan dampak inflasi terhadap masyarakat miskin, meskipun inflasi tinggi, kebijakan pemerintah dalam subsidi, bantuan sosial, dan stabilisasi harga berperan besar dalam menjaga kesejahteraan masyarakat.

Fenomena inflasi yang terjadi di Indonesia dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan dinamika yang tidak biasa. Alih-alih menghadapi lonjakan harga yang tinggi, Indonesia justru mengalami tren inflasi rendah (BPS, 2025). Fenomena ini memunculkan kekhawatiran di kalangan ekonom karena inflasi yang terlalu rendah bisa menjadi indikator pelemahan daya beli masyarakat dan stagnasi ekonomi. Ketika harga barang dan jasa turun secara konsisten, masyarakat cenderung menunda konsumsi, dan pelaku usaha menahan produksi serta investasi.

Hal ini menciptakan siklus negatif yang memperlambat pertumbuhan ekonomi. Sektor industri manufaktur, misalnya, menunjukkan tren pertumbuhan yang terus menurun sejak 2022, dan banyak perusahaan mengalami kesulitan hingga melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) massal. Inflasi rendah di Indonesia juga dipengaruhi oleh deflasi pada komponen harga bergejolak seperti bahan makanan dan energi. Ini menunjukkan bahwa tekanan harga dari sisi penawaran sangat lemah, sementara permintaan domestik belum pulih secara signifikan.

Secara global, tren inflasi rendah juga terjadi di berbagai negara seperti Amerika Serikat, zona Euro, dan Inggris, yang mendorong bank sentral mereka menurunkan suku bunga acuan. Namun, dalam konteks Indonesia, tantangannya lebih kompleks karena menyangkut struktur industri, ketimpangan daya beli, dan efektivitas kebijakan fiskal serta moneter. Para pengamat menilai bahwa pemerintahan Presiden Prabowo perlu mengambil langkah luar biasa untuk mendorong hilirisasi industri, memperkuat sektor riil, dan meningkatkan konsumsi domestik agar inflasi kembali ke tingkat yang sehat dan pertumbuhan ekonomi bisa berlanjut.

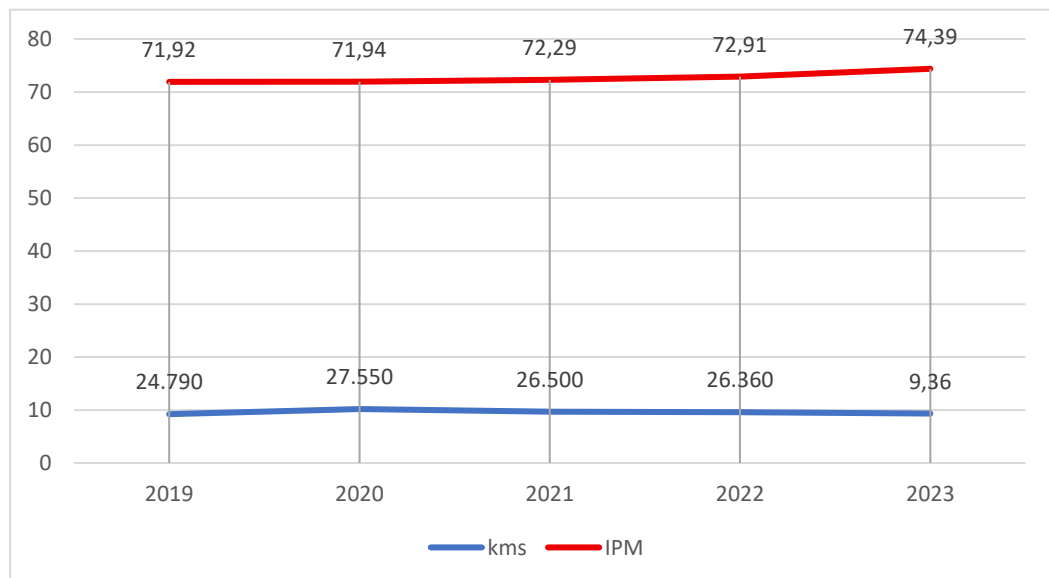
Faktor yang dapat memperburuk keadaan perekonomian di Indonesia selain inflasi adalah Indeks Pembangunan Manusia (IPM), IPM yang rendah atau tidak merata dapat memperkuat kemiskinan struktural dan memperlambat penanggulangannya. Indikator komposit yang digunakan untuk mengukur capaian pembangunan manusia dalam tiga dimensi dasar yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Dimensi kesehatan diukur melalui harapan hidup saat lahir, dimensi pendidikan melalui rata-rata lama sekolah dan harapan lama sekolah, sedangkan dimensi standar hidup melalui pengeluaran per kapita yang disesuaikan. IPM tidak hanya mencerminkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh (Febrianti *et al.*, 2024).

Fenomena sosial ekonomi yang memengaruhi IPM di Indonesia sangat kompleks dan saling berkaitan bahwa pendidikan, kesehatan, dan tingkat pengangguran merupakan faktor utama yang memengaruhi IPM di tingkat provinsi. Selain itu, migrasi penduduk dari desa ke kota juga berdampak pada distribusi IPM, karena daerah perkotaan cenderung memiliki akses yang lebih

baik terhadap layanan dasar. Ketimpangan ini memperlihatkan bahwa pembangunan manusia di Indonesia belum merata dan masih memerlukan intervensi kebijakan yang lebih terfokus dan inklusif agar tidak memperparah kemiskinan di Indonesia (Amrun Rosyid *et al.*, 2024).

Penelitian Aisyah *et.,al* (2022), dalam *Jurnal Alujrah* menunjukkan bahwa Indeks Pembangunan Manusia (IPM) memiliki pengaruh signifikan terhadap penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia, di mana peningkatan pendidikan, kesehatan, dan standar hidup yang tercermin dalam IPM mampu memperluas akses kerja, meningkatkan produktivitas, serta memperkuat daya beli masyarakat sehingga mendorong keluar dari lingkaran kemiskinan, sehingga penelitian ini menegaskan pentingnya kebijakan pembangunan manusia yang komprehensif sebagai strategi utama pengentasan kemiskinan

Berikut data kemiskinan dan indeks pembangunan manusia di Indonesia 5 tahun terakhir mulai tahun 2019-2023:



Sumber : BPS (Badan Pusat Statistik), 2025

Gambar 1. 3 Kemiskinan dan Indeks Pembangunan Manusia (Poin)

Gambar 1.3 menunjukkan perubahan dua variabel penting, yaitu tingkat kemiskinan (Kms) dan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Garis biru mewakili tingkat kemiskinan (Kms), sedangkan garis merah mewakili IPM. IPM menunjukkan tren peningkatan yang konsisten dari tahun ke tahun. Pada 2019, IPM berada di angka 71,92 dan terus meningkat hingga mencapai 74,39 pada 2023. Kenaikan IPM ini mencerminkan perbaikan dalam tiga dimensi utama pembangunan manusia kesehatan, pendidikan, dan standar hidup. Peningkatan IPM selama masa pandemi menunjukkan bahwa meskipun ekonomi terguncang, investasi pemerintah dalam layanan dasar seperti pendidikan daring, layanan kesehatan, dan bantuan sosial tetap berjalan dan bahkan ditingkatkan.

Fenomena yang menarik terjadi pada tahun 2020, ketika kemiskinan meningkat namun IPM tetap naik. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun banyak masyarakat jatuh miskin akibat kehilangan pekerjaan dan pendapatan, akses terhadap layanan dasar tetap terjaga. Pemerintah mengalokasikan anggaran besar untuk bantuan langsung tunai, subsidi kuota internet untuk pelajar, dan perbaikan layanan kesehatan, yang berkontribusi terhadap peningkatan IPM. Pada tahun 2022 dan 2023, kemiskinan menurun seiring dengan peningkatan IPM. Penurunan kemiskinan ini tidak hanya disebabkan oleh pemulihan ekonomi, tetapi juga oleh kebijakan fiskal yang pro-rakyat, seperti subsidi energi, bantuan pangan, dan program padat karya. Kenaikan IPM yang berkelanjutan menunjukkan bahwa pembangunan manusia tetap menjadi prioritas, bahkan di tengah tantangan global seperti krisis pangan dan energi.

Secara keseluruhan, data menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan dan IPM bergerak dalam arah yang berbeda pada beberapa tahun, kebijakan pemerintah yang tepat dapat menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia. Peningkatan IPM di tengah fluktuasi kemiskinan menjadi indikator bahwa pembangunan tidak hanya diukur dari pendapatan, tetapi juga dari kualitas hidup secara menyeluruh.

Meskipun secara umum kualitas hidup meningkat, namun jika tidak didukung oleh harga-harga barang yang stabil akan menyebabkan sebagian besar pendapatan masyarakat di alokasikan untuk konsumsi. Konsumsi adalah kegiatan ekonomi yang bertujuan untuk menggunakan, mengurangi, atau menghabiskan barang dan jasa guna memenuhi kebutuhan dan kepuasan manusia secara langsung. Konsumsi dapat meliputi segala hal yang dikonsumsi, baik itu makanan, pakaian, tempat tinggal, energi, ataupun barang-barang lain yang digunakan untuk mencapai kepuasan atau kenyamanan tertentu. Konsumsi memiliki pengertian yang lebih luas yaitu seluruh pembelian barang dan jasa akhir yang sudah siap dikonsumsi oleh rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan (Takahindangen *et al.*, 2021).

Namun pada pembahasan ini, yang akan dibahas adalah konsumsi solar. Konsumsi solar mengacu pada penggunaan bahan bakar solar oleh individu, perusahaan, atau industri untuk berbagai kebutuhan, seperti menggerakkan mesin diesel, alat transportasi, pembangkit listrik, atau keperluan industri lainnya. Solar adalah bahan bakar fosil yang banyak digunakan di sektor transportasi dan industri karna efisien energinya. Dalam konteks ekonomi atau energi, konsumsi solar biasanya diukur dalam volume tertentu seperti (liter) dan dianalisis dalam

kaitannya dengan faktor-faktor seperti harga bahan bakar, kebijakan energi, serta permintaan industri dan transportasi. Jumlah transportasi setiap tahunnya mengalami peningkatan. Kondisi ini berdampak pada konsumsi bahan bakar yang dibutuhkan, sedangkan asumsinya jumlah minyak yang digunakan lambat laun mengalami penurunan. Akibatnya harga bahan bakar mengalami peningkatan dan kualitas bahan bakar semakin menurun. Permasalahan tersebut perlu dicarikan solusi baik berupa energi pengganti ataupun *energy alternative* (Nurtanto, 2018).

Konsumsi solar di Indonesia memiliki dampak signifikan terhadap kemiskinan, terutama di sektor-sektor yang sangat bergantung pada bahan bakar ini, seperti transportasi dan pertanian. Ketika harga solar meningkat, biaya operasional di sector-sektor ini juga meningkat, yang pada akhirnya dapat mengurangi pendapatan bersih masyarakat yang bekerja di sektor-sektor tersebut. Hal ini dapat memperburuk kondisi kemiskinan, karena masyarakat miskin harus mengeluarkan lebih banyak uang untuk bahan bakar, sehingga mengurangi kemampuan mereka untuk memenuhi kebutuhan dasar lainnya.

Fenomena tingkat konsumsi solar di Indonesia memiliki keterkaitan erat dengan dinamika kemiskinan, terutama dalam konteks akses energi dan ketahanan ekonomi rumah tangga miskin. Solar, sebagai bahan bakar utama untuk sektor transportasi dan sebagian industri kecil, memainkan peran penting dalam rantai pasok barang dan jasa yang dikonsumsi oleh masyarakat luas. Ketika harga solar naik atau distribusinya terganggu, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pelaku usaha, tetapi juga oleh masyarakat miskin yang bergantung pada transportasi umum dan barang kebutuhan pokok yang harganya ikut terdorong naik.

Studi yang dilakukan oleh Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI), menunjukkan bahwa kenaikan harga energi, termasuk solar, secara signifikan meningkatkan tingkat kemiskinan di Indonesia, baik dalam bentuk kemiskinan agregat maupun kemiskinan di wilayah perdesaan dan perkotaan. Dampak ini lebih terasa di Pulau Jawa, di mana ketergantungan terhadap transportasi berbasis solar lebih tinggi dan distribusi barang sangat bergantung pada kendaraan bermotor. Ketika harga solar naik, biaya logistik meningkat, dan harga barang kebutuhan pokok ikut terdorong naik. Masyarakat miskin, yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi dasar, menjadi kelompok yang paling rentan terhadap tekanan ini.

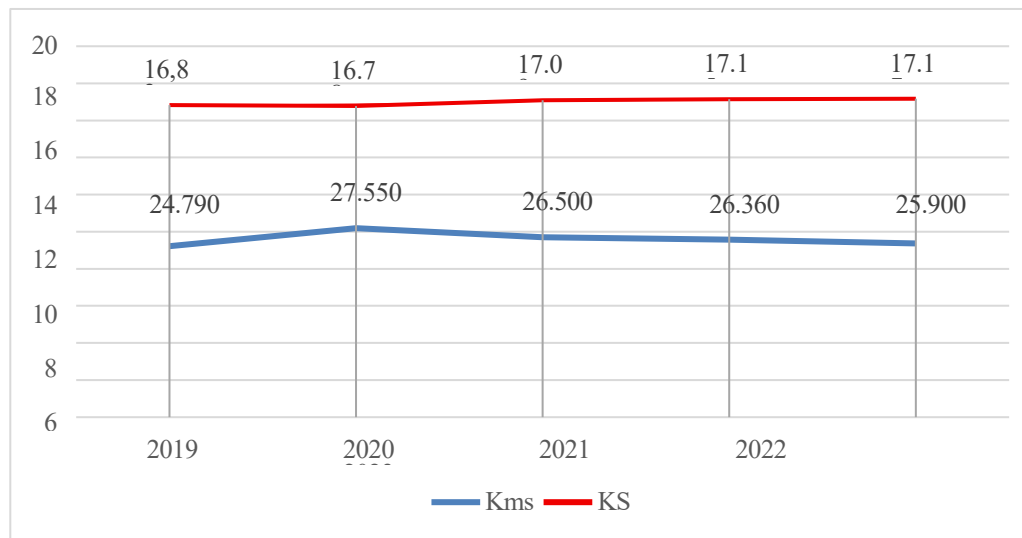
Selain itu, fenomena kemiskinan energi juga muncul sebagai dimensi baru dalam analisis kemiskinan. Kemiskinan energi merujuk pada keterbatasan akses terhadap energi modern yang terjangkau dan andal, termasuk solar untuk usaha kecil dan transportasi. Di banyak daerah, terutama di luar Jawa, masyarakat miskin menghadapi tantangan ganda, harga solar yang tinggi dan distribusi yang tidak merata. Hal ini memperburuk ketimpangan wilayah dan memperlambat mobilitas ekonomi lokal. Dalam jangka panjang, ketergantungan terhadap solar sebagai sumber energi utama menimbulkan tantangan struktural. Pemerintah dihadapkan pada dilema antara menjaga subsidi energi untuk melindungi kelompok rentan dan mendorong transisi menuju energi yang lebih bersih dan berkelanjutan. Jika subsidi solar dikurangi tanpa kompensasi yang memadai, maka risiko peningkatan kemiskinan akan semakin besar. Sebaliknya, jika subsidi dipertahankan terlalu lama, beban fiskal negara akan meningkat dan transisi energi akan terhambat. Fenomena ini menunjukkan bahwa konsumsi solar bukan

sekadar isu energi, tetapi juga isu sosial dan ekonomi yang memerlukan pendekatan lintas sektor.

Permintaan solar diperkirakan turun 3,7% pada 2025, seiring dengan meningkatnya penggunaan kendaraan listrik dan efisiensi energi di sektor industri. Tidak dapat dipungkiri bahwasanya ada perubahan penggunaan energi, dari energi solar kepada energi listrik, dikarenakan jumlah energi solar terbatas, maka dari itu pemerintah mencari alternatif lain untuk menggantikan solar (Ali, 2022).

Peningkatan konsumsi solar dapat dijadikan indikator bahwa masyarakat memiliki kemampuan lebih dalam mengakses energi. Hal ini mencerminkan adanya peningkatan daya beli, yang pada gilirannya mengindikasikan penurunan tingkat kemiskinan karena energi adalah kebutuhan dasar untuk aktivitas ekonomi dan sosial. Peningkatan konsumsi solar mencerminkan kemampuan masyarakat dalam mengakses energi, yang berarti adanya peningkatan daya beli sehingga mengindikasikan berkurangnya tingkat kemiskinan; hal ini sejalan dengan pandangan bahwa energi merupakan kebutuhan dasar sekaligus faktor produksi, sehingga ketika masyarakat mampu membeli dan menggunakan solar untuk transportasi, industri kecil, maupun aktivitas rumah tangga, maka hal tersebut menunjukkan adanya perbaikan kesejahteraan dan peningkatan produktivitas, di mana konsumsi energi dapat dijadikan proxy bagi kesejahteraan ekonomi dan indikator penurunan kemiskinan sebagaimana ditegaskan dalam berbagai studi tentang hubungan konsumsi energi, daya beli, dan pembangunan.

Berikut data kemiskinan dan konsumsi solar di Indonesia berdasarkan dari 5 tahun terakhir mulai tahun 2019-2023:



Sumber: Kemenkeu (Kementerian Keuangan), 2025

Gambar 1. 4 Kemiskinan dan Konsumsi Solar Indonesia Tahun 2019 – 2023 KL (Kilo Liter).

Gambar 1.4 ini menunjukkan kemiskinan (Kms) dan konsumsi solar (KS) di Indonesia dari tahun 2019 hingga 2023. Garis merah mewakili Konsumsi Solar (KS), pada tahun 2019 sebesar 16,83 juta kiloliter dan meningkat pada tahun 2023 yaitu 17,1 juta kilo liter. Konsumsi solar mengalami sedikit fluktuasi, tetapi cenderung meningkat dari tahun ke tahun. Ini menunjukkan bahwa meskipun kemiskinan menurun, penggunaan solar tetap tinggi, yang bisa mencerminkan aktivitas ekonomi yang semakin meningkat.

Hubungan antara kemiskinan dan konsumsi solar adalah ketika konsumsi solar menurun maka kemiskinan meningkat, karena aktivitas ekonomi melemah dan masyarakat mengurangi penggunaan transportasi serta industri beroperasi dengan kapasitas lebih rendah. Sebaliknya, ketika konsumsi solar meningkat maka kemiskinan menurun, karena lebih banyak orang bekerja, industri berkembang, dan mobilitas masyarakat meningkat. Ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi berkontribusi pada penurunan kemiskinan

dan peningkatan konsumsi solar, yang mencerminkan aktivitas ekonomi yang lebih stabil.

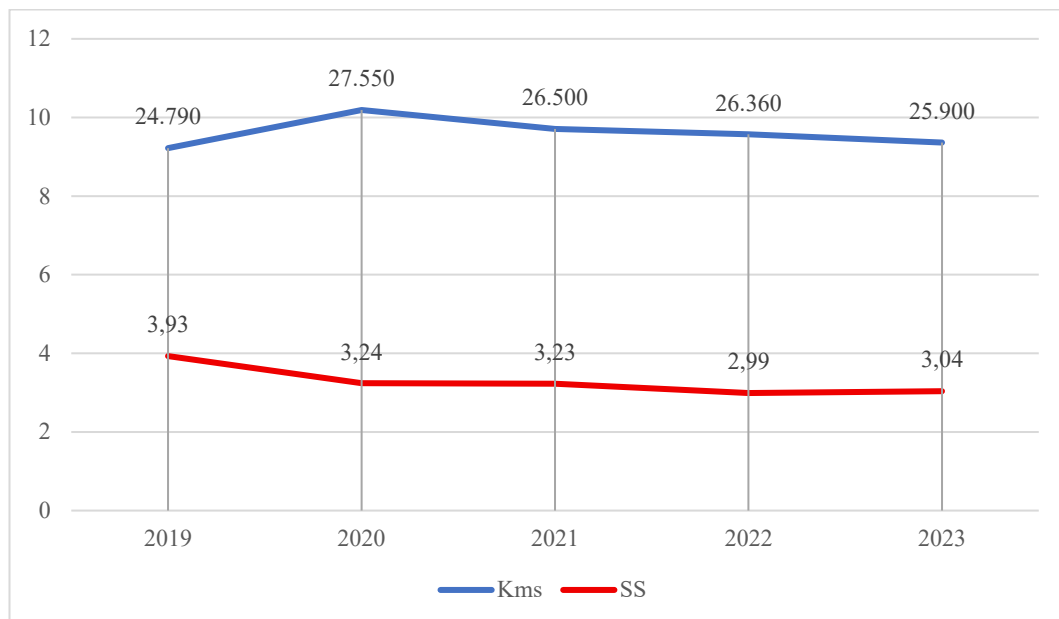
Indikator lain yang dapat menyebabkan kemiskinan di Indonesia adalah subsidi solar. Subsidi adalah bantuan uang untuk komoditas, perkumpulan atau masyarakat yang umumnya diberikan oleh pihak pemerintah. *Spencer & Amos*, dalam bukunya yang berjudul *Contemporary Economics*, subsidi adalah suatu pembayaran yang dilakukan oleh pihak pemerintah (pembayaran dalam bentuk apapun) dalam suatu perusahaan ataupun rumah tangga agar mencapai suatu tujuan tertentu yang dapat meringankan beban penerima.

Subsidi solar di Indonesia bertujuan untuk menurunkan harga bahan bakar solar sehingga lebih terjangkau bagi masyarakat. Dengan adanya subsidi, biaya operasional di sektor-sektor ini dapat ditekan, yang pada akhirnya dapat meningkatkan pendapatan bersih masyarakat dan mengurangi kemiskinan. Namun, subsidi solar juga dapat menimbulkan ketergantungan pada bahan bakar fosil dan menghambat perkembangan energi terbarukan. Selain itu, subsidi yang tidak tepat sasaran dapat mengurangi efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan.

Saat ini, pemerintah Indonesia sedang mempertimbangkan peningkatan subsidi solar untuk tahun 2025. Berdasarkan hasil rapat kerja dengan Komisi VII DPR RI, subsidi solar yang sebelumnya ditetapkan sebesar Rp1.000 per liter berpotensi naik hingga Rp3.000 per liter. Hal ini dilakukan untuk menjaga harga jual eceran tetap terjangkau, mengingat harga biosolar mencapai Rp12.100 per liter (Uly & Ika, 2024).

Studi yang dilakukan Mauludiyah & Akbar, (2024) disektor industri BBM seperti seperti minyak solar digunakan untuk pembangkit energi pabrik, dan khusus di sektor industri transportasi, solar merupakan komponen utama kendaraan transportasi oleh karena itu, kenaikan harga BBM akan sangat berkaitan erat dengan terjadinya kenaikan harga barang dan jasa di pasar. BBM (Bahan Bakar Minyak) merupakan komoditas strategis bagi perekonomian, baik di sektor rumah tangga, industri, transportasi, dan layanan publik lainnya.

Berikut data kemiskinan dan subsidi solar di Indonesia berdasarkan dari 5 tahun terakhir mulai tahun 2019-2023:



Sumber: Kemenkeu (Kementrian Keuangan), 2025

Gambar 1. 5 Kemiskinan dan Subsidi Solar Indonesia Tahun 2019–2023 (Rp)

Gambar 1.5 ini menunjukkan kemiskinan (Kms) dan subsidi solar (SS) di Indonesia dari tahun 2019-2023. Garis merah mewakili tingkat subsidi solar (SS) yang mengalami penurunan pada tahun 2020 sebesar 3,24% sampai 2022 sebesar 2,99%. Alasan nya adalah adanya perubahan kebijakan energi, yang dimana pemerintah mengarahkan kebijakan energi ke penggunaan bahan bakar yang lebih

ramah lingkungan, sehingga subsidi untuk bahan bakar fosil seperti solar mulai dikurangi. Kemudian meningkat pada tahun 2023 sebesar 3,04%. Alasan nya adalah harga minyak mentah global mengalami kenaikan, sehingga pemerintah harus menyesuaikan subsidi agar harga solar tetap terjangkau.

Hubungan antara kemiskinan dan subsidi solar adalah ketika kemiskinan meningkat, subsidi solar menjadi penting untuk menjaga daya beli masyarakat, terutama bagi sektor transportasi dan industri kecil. Sebaliknya, ketika kemiskinan menurun, subsidi solar tetap diperlukan untuk menjaga stabilitas harga energi, sehingga masyarakat tetap memiliki akses terhadap bahan bakar yang terjangkau.

Fenomena tingkat subsidi solar di Indonesia memiliki dampak yang signifikan terhadap dinamika kemiskinan, terutama karena solar merupakan bahan bakar utama bagi sektor transportasi, perikanan, pertanian, dan industri kecil semuanya sangat dekat dengan kehidupan masyarakat berpendapatan rendah. Subsidi solar, yang merupakan bagian dari subsidi energi nasional, bertujuan untuk menjaga keterjangkauan harga energi agar masyarakat miskin dan rentan tetap memiliki akses terhadap mobilitas dan produksi ekonomi. Namun, efektivitasnya dalam mengurangi kemiskinan masih menjadi perdebatan di kalangan ekonom dan pembuat kebijakan.

BPS, (2025) tingkat kemiskinan nasional menurun dan jumlah penduduk miskin berkurang, penurunan ini dikaitkan dengan stabilisasi harga pangan dan bantuan sosial yang lebih terarah. Namun, tantangan muncul dalam efektivitas subsidi. Banyak program subsidi, terutama subsidi BBM seperti solar, masih belum sepenuhnya tepat sasaran. Subsidi BBM seperti solar membantu menekan biaya transportasi dan produksi, sehingga harga barang kebutuhan pokok bisa

lebih stabil. Ini penting karena inflasi energi sangat berdampak pada rumah tangga miskin yang mengalokasikan sebagian besar pendapatannya untuk konsumsi dasar. Menurut Kementerian Keuangan, (2025) subsidi dapat membantu mengurangi ketimpangan jika diarahkan secara tepat. Namun, subsidi yang bersifat umum (seperti BBM) sering kali lebih dinikmati oleh kelompok menengah ke atas, sehingga tidak efektif dalam menurunkan kemiskinan ekstrem.

Di sisi lain, subsidi solar yang tidak tepat sasaran berisiko dinikmati oleh kelompok yang sebenarnya tidak tergolong miskin, seperti pelaku industri besar atau pemilik kendaraan pribadi berbahan bakar solar. Keterkaitan subsidi solar dengan kemiskinan paling nyata terlihat di sektor perikanan dan transportasi umum. Nelayan, misalnya, sangat bergantung pada solar untuk operasional kapal mereka. Kajian dari *Institute for Development of Economics and Finance* (INDEF), menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan nelayan jauh lebih tinggi dibandingkan penduduk non-nelayan, dan subsidi solar yang tepat sasaran dapat membantu menurunkan biaya produksi serta meningkatkan pendapatan mereka. Begitu pula dengan angkutan umum di daerah perdesaan, yang menjadi satu-satunya akses mobilitas bagi masyarakat miskin.

Ketika harga solar naik atau distribusinya terganggu, biaya transportasi melonjak dan harga barang kebutuhan pokok ikut terdorong naik, memperburuk tekanan hidup kelompok miskin. Namun, subsidi solar juga menghadirkan dilema kebijakan. Di satu sisi, ia berfungsi sebagai bantalan sosial untuk kelompok rentan. Di sisi lain, ia menimbulkan beban fiskal dan distorsi pasar yang menghambat efisiensi ekonomi dan transisi energi. Pemerintah menghadapi tantangan besar dalam merancang skema subsidi yang lebih adil dan tepat sasaran.

Pendekatan berbasis data, seperti pemanfaatan sistem *My Pertamina* dan integrasi dengan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS), menjadi kunci untuk memastikan bahwa subsidi solar benar-benar menyentuh kelompok yang membutuhkan.

Harga solar bersubsidi yang jauh lebih murah menarik minat pengguna yang tidak berhak, seperti perusahaan tambang dan perkebunan besar, sehingga terjadi penyalahgunaan. Selain itu, peningkatan konsumsi akibat pemulihan ekonomi tidak diimbangi dengan peningkatan kuota, yang menyebabkan antrean panjang di SPBU. Untuk mengatasi masalah ini, pemerintah mulai menerapkan sistem QR Code pada tahun 2023 untuk memastikan subsidi tepat sasaran. Sistem ini diharapkan dapat mengurangi penyalahgunaan dan memastikan bahwa solar bersubsidi hanya digunakan oleh konsumen yang berhak.

Gambar 1.5 ini menunjukkan bahwa pemulihan ekonomi setelah pandemi berkontribusi pada penurunan kemiskinan dan peningkatan subsidi solar, yang mencerminkan upaya pemerintah dalam menjaga kesejahteraan masyarakat. Harga Solar yang stabil jika pemerintah menjaga harga solar tetap terjangkau melalui subsidi atau mekanisme pengendalian, maka biaya produksi dan distribusi barang dapat ditekan, mengurangi dampak inflasi pada masyarakat miskin. Solar adalah bahan bakar penting bagi transportasi, industri, dan sektor pertanian. Konsumsi solar yang optimal dan efisien dapat membantu menurunkan kemiskinan melalui efisiensi transportasi, solar adalah bahan bakar utama bagi kendaraan pengangkut barang dan transportasi umum. Ketersediaan solar dengan harga yang terjangkau membantu menurunkan biaya logistik, sehingga harga kebutuhan pokok tetap terjangkau bagi masyarakat miskin.

Penelitian oleh (Yaqin *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa kenaikan harga energi, termasuk solar, meningkatkan kemiskinan di Indonesia, baik dalam hal kemiskinan agregat maupun kemiskinan pedesaan atau perkotaan. Penelitian ini juga menemukan bahwa dampak kenaikan harga energi lebih besar selama periode pandemi Covid-19 dibandingkan periode sebelum pandemi. Penelitian lain oleh Shinetiara & Adry, (2023) menemukan bahwa kemiskinan energi memiliki pengaruh signifikan terhadap ketimpangan pendapatan di Indonesia. Perbedaan hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara konsumsi solar dan kemiskinan di Indonesia.

Penelitian oleh Khairi & Aidar, (2018) menunjukkan bahwa subsidi energi memiliki pengaruh negatif dan signifikan terhadap kemiskinan di Indonesia. Penelitian ini menggunakan data time series dari tahun 2002 hingga 2016 dan menemukan bahwa subsidi energi dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Penelitian lain oleh Asfar & Wijaya, (2024) menemukan bahwa subsidi energi, termasuk subsidi listrik dan gas, memiliki pengaruh signifikan terhadap pengurangan tingkat kemiskinan di Provinsi Jawa Timur. Perbedaan hasil ini menunjukkan perlunya penelitian lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan antara subsidi solar dan kemiskinan di Indonesia.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kenaikan harga energi meningkatkan kemiskinan, terutama selama pandemi. Penelitian lain menunjukkan bahwa subsidi energi dapat membantu mengurangi kemiskinan dengan meningkatkan daya beli masyarakat. Sedangkan penelitian

penulis ingin meneliti bagaimana inflasi, indeks pembangunan manusia, konsumsi dengan subsidi solar dalam mempengaruhi kemiskinan.

Berdasarkan latar belakang yang sudah dijelaskan sebelumnya, oleh sebab itu peneliti tertarik dan akan mengkaji lebih lanjut dengan judul **“Pengaruh Inflasi, IPM, Konsumsi dan Subsidi Solar terhadap Kemiskinan di Indonesia”**.

1.2 Rumusan Masalah Penelitian

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian diatas dapat disimpulkan rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia?
2. Bagaimana pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia?
3. Bagaimana pengaruh konsumsi solar terhadap kemiskinan di Indonesia?
4. Bagaimana pengaruh subsidi solar terhadap kemiskinan di Indonesia?
5. Bagaimana pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, konsumsi dan subsidi solar terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dilakukan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui pengaruh inflasi terhadap kemiskinan di Indonesia.
2. Mengetahui pengaruh indeks pembangunan manusia terhadap kemiskinan di Indonesia.
3. Mengetahui pengaruh konsumsi solar terhadap kemiskinan di Indonesia.
4. Mengetahui pengaruh subsidi solar terhadap kemiskinan di Indonesia.
5. Mengetahui pengaruh inflasi, indeks pembangunan manusia, konsumsi dan subsidi solar terhadap kemiskinan di Indonesia?

1.4 Manfaat Penelitian

Suatu penelitian ilmiah tentunya dapat bermanfaat secara teoritis maupun praktis. Adapun manfaat yang diharapkan dari adanya penelitian ini adalah sebagai berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

Adapun manfaat teoritis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Memperkaya pemahaman tentang apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kemiskinan di Indonesia.
2. Sebagai landasan untuk penelitian dimasa yang akan datang dan juga dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di Indonesia yang kompleks dengan menggunakan model yang lebih canggih.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Akan memberikan dampak langsung kepada yang berkepentingan, termasuk pemerintah dan masyarakat, dan lembaga keuangan dalam rangka menurunkan tingkat kemiskinan Indonesia dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.
2. Sebagai referensi peneliti selanjutnya, yang ingin mengembangkan penelitian ini lebih lanjut.